

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : LATIFAH HANUM
NPM : 1805170107
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : LATIFAH HANUM
N P M : 1805170107
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA*

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. SYAFRIDA HANI, SE., M.Si.)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, SE., MM.)

Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA SE., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : LATIFAH HANUM

N.P.M : 1805170107

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : **PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN
MINUMAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2017-2021**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 08 September 2022

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. DR. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

(H. JANURI, SE., M.M., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : LATIFAH HANUM
NPM : 1805170107
Dosen Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA S.E., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- Perbaiki kembali rumusan masalah! - Periksa kembali dan perbaiki katays sbhl.		EH. 25/8-22
BAB 2	- Perbaiki lagi konseptual.		EH. 27/8-22
BAB 3	- Perbaiki kembali penulisan.		EH. 27/8-22.
BAB 4	- Pembahasan & perbaikan dan boleh didasarkan ans hasil penulisan terdahulu.		EH. 30/8-22
BAB 5	- sesuaikan dgn hasil penulisan.		EH. 30/8-22.
DAFTAR PUSTAKA	- sesuaikan dgn kutipan.		1/8-22 EH.
PERSETUJUAN SIDANG MEJA HIJAU	Melaksanakan bimbingan, Ace & Ujikan pada Rtdag Meja Hijau		EH. 8/9-22.

Medan, / Agustus 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Dr. ZULIAHANUM, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Latifah Hanum
NPM : 1805170107
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, 9 September 2022

Yang menyatakan,




Latifah Hanum
NPM. 1805170107

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021

LATIFAH HANUM

Program Studi Akuntansi

Email : hanumlatifa2804@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* yang diprosikan dengan presentase dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* yang diprosikan dengan komite audit terhadap *tax avoidance*, untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* yang diprosikan dengan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Populasi pada penelitian ini seluruh Manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sebanyak 20 perusahaan dan sampel dari penelitian pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman sebanyak 8 dengan kriteria yang ditetapkan oleh penulis perusahaan dengan 5 tahun pengamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda, asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, kualitas auditor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dan *Corporate Governance* (komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit) secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

Kata Kunci : Corporate Governance, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit dan Tax Avoidance

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE IN REGISTERED FOOD AND BEVERAGE MANUFACTURING COMPANIES ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 2017-2021

Latifah Hanum

Accounting Study Program

Email : hanumlatifa2804@gmail.com

The purpose of this study was to determine the effect of good corporate governance proxied by the percentage of independent commissioners on tax avoidance, to determine the effect of good corporate governance proxied by institutional ownership on tax avoidance, to determine the effect of good corporate governance promoted by the audit committee on tax avoidance, to determine the effect of good corporate governance that is promoted by audit quality on tax avoidance. The population in this study were all manufacturers of the food and beverage sub-sector listed on the BEI as many as 20 companies and samples from research on the food and beverage sub-sector manufacturing companies were 8 with the criteria set by the author of the company with 5 years of observation. The data collection technique used in this research is documentation. The analysis technique used in this study is multiple linear regression, classical assumptions, hypothesis testing and coefficient of determination. The results show that independent commissioners have no effect on tax avoidance, institutional ownership has a positive and significant effect on tax avoidance, the audit committee has no influence on tax avoidance, auditor quality has a negative and significant influence on tax avoidance and corporate governance (independent commissioners, institutional ownership, audit committee and audit quality) simultaneously have a significant and significant effect on tax avoidance in Food and Beverage Subsector Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period.

Keywords: *Corporate Governance, Independent Commissioner, Institutional Ownership, Audit Committee, Audit Quality and Tax Avoidanc*

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

Dalam menyelesaikan proposal ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan

proposal. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada kedua orang tua saya, ayahanda Abdul Husin dan ibunda tercinta saya Mazidah yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri S.E., M.M, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E. M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Elizar Sinambela SE.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

8. Ibu **Henny Zurika Lubis, SE, M.Si** selaku dosen pembimbing akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Pak Rudi ,Bu ira ,dan Nenek Marhamah Sekeluarga yang sangat berjasa di hidup saya ,karena berkat merekalah saya bisa sampai di titik ini dan menjadi seorang sarjana.
10. Kepada kakak saya Nuraini,adik saya Fadillah Fauza dan abg ipar saya Sujasman Rahman yang selalu support dan mendoakan.
11. Kepada Teman – Teman Seperjuangan Dwita noviyanti,Ceby Clara Jesika,Fanny Febyola,Afif Muis Fahri Mansyur,Ishaq Siregar,Fahri Efendi dan Habibul Awal .Terima kasih telah kebersamai selama 4 tahun ini.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alalh SWT membalas kebaikan kalian semua.
13. Terakhir yang harusnya paling utama.Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat dan bertahan sampai di titik ini.

You Can If You Want

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Oktober 2022

Penulis

LATIFAH HANUM
NPM:1805170107

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	16
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 <i>Tax avoidance</i>	18
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i>	21

2.2 Kerangka Konseptual	34
2.2.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	34
2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	35
2.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	36
2.2.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	37
2.3 Hipotesis Penelitian	38
BAB 3 METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Definisi Operasional Variabel	41
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.3.1 Tempat Penelitian	43
3.3.2 Waktu Penelitian	43
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	44
3.4.1 Populasi	44
3.4.2 Sampel	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis data	46
3.6.1 Regresi Linier Berganda	46
3.6.2 Pengujian Hipotesis	48
3.6.3 Koefisien Detirminasi	50
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Hasil Penelitian	51

4.1.1 Deskripsi Data.....	51
4.1.2 Analisis Data.....	55
4.2 Pembahasan	65
BAB 5 PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Data <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Tax Avoidance</i>	8
Tabel 2. 1 Indikator <i>Tax Avoidance</i>	19
Tabel 3. 4 Definisi Operasional	42
Tabel 3. 5 Skedul Rencana Penelitian.....	43
Tabel 3. 6 Daftar Populasi	44
Tabel 3. 7 Daftar Sampel	46
Tabel 4. 1 Daftar Nama Perusahaan Menjadi Sampel Penelitian	52
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4. 3 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	56
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel 4.6 Uji Parsial.....	61
Tabel 4.7 Uji Simultan	63
Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
Gambar 4. 1 Penelitian menggunakan P-Plot	56
Gambar 4.2 Penelitian menggunakan Heteroskedastisitas.....	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat, menurut Pengertian Pajak dalam UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pajak memiliki pengaruh yang kuat terhadap negara karena memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara.

Dalam akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan akan cenderung untuk mencari cara agar beban pajak yang dibayarkan jumlahnya lebih kecil daripada yang seharusnya. Karena, pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan laba sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Ardyansah, 2014). Ketidapatuhan wajib pajak tersebut dapat mengganggu keuangan Negara karena dengan tidak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan akan mempengaruhi penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Cara yang dilakukan perusahaan yaitu dengan melakukan *tax planning* atau dengan *tax avoidance*.

Tax Avoidance adalah upaya untuk mengurangi pajak, tetapi tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan, seperti mengambil keuntungan dari pengecualian dan pengurangan yang dikenakan atau penangguhan pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (ngadiman & Puspitasari, 2014:410) dalam (Dahrani, 2021).

Menurut Ernest R Mortenson dalam (Kurnia, 2010) dalam (Ritonga, 2012) “Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya, namun semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar penghematan yang dilakukan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Karena *Tax avoidance* yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pajak, maka sulit untuk menuntut para pelaku *tax avoidance* secara hukum meskipun praktik *tax avoidance* akan mempengaruhi penerimaan Negara dari sektor pajak.

Dalam bukunya Suandy Perencanaan Pajak (2008) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

- Jumlah pajak yang harus dibayar

Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;

- Biaya untuk menyuap fiskus

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;

- Kemungkinan untuk terdeteksi

semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran; dan

- Besar sanksi

semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Untuk menghindari usaha-usaha yang dilakukan manajemen pajak tidak melanggar aturan, manajemen pajak perlu pengawasan. Pembentukan *Good corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya bagian perpajakan perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya (Alpi, 2019).

Good Corporate Governance merupakan konsep yang didasari pada teori agensi (Gunawan, Mukhzarudfa, & Wahyudi, 2019). Teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Adanya penerapan *good corporate governance* bertujuan untuk meminimalisir konflik keagenan yang timbul ketika tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Sehingga perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik dapat menjadi penentu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Secara spesifik *good corporate governance* dijadikan determinan yang penting dari penilaian untuk penghematan pajak. Jika suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *good corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan kaitan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Pelaksanaan *corporate governance* yang baik akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan. Lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *corporate governance* merupakan salah satu faktor penentu permasalahan dalam perusahaan. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair (Laksana, 2015) dalam (Sinambela & Rachmawati, 2021).

Aturan struktur *good corporate governance* mempengaruhi upaya perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Munculnya kasus-kasus terkait cara untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar melalui usaha tindakan *tax avoidance* memicu timbulnya pertanyaan bagi pihak *good corporate governance* yang berakibat dengan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme *good corporate governance* (GCG) belum diterapkan di perusahaan publik di Indonesia. Hal ini dapat membuat perusahaan melaporkan informasi yang kurang sesuai dengan kenyataan serta mendorong perusahaan melakukan manipulasi akuntansi untuk menghindari besarnya beban pajak terutang.

Penelitian terhadap hubungan langsung antara *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* masih jarang dijumpai di Indonesia karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha (*corporate tax*) yang dibayar perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan khususnya laporan arus kas belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena laporan arus kas untuk pembayaran pajak bercampur dengan pembayaran pajak-pajak lain yang menjadi kewajiban perusahaan seperti pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, denda dan sanksi pajak (Pohan, 2008) dalam (Hendrawati, 2018).

Dalam tulisan ini penulis berusaha menginvestigasi sejauh mana aktivitas *good corporate governance* mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya melalui kegiatan *tax avoidance* dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam perusahaan seperti mendisiplinkan, memantau, dan mempengaruhi. Berdasarkan hak dan suara yang dimiliki oleh pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk meminimalisir perilaku mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional berperan untuk mendorong pengawasan optimal terhadap kinerja manajer dalam mengelola perusahaan sehingga berpotensi untuk mengurangi konflik kepentingan (Siregar & Syarifuddin, 2020) dalam (Prambudi & Setiawati, 2021)

Komisaris independen merupakan orang-orang yang bertanggung jawab dan mengawasi kinerja manajemen agar tidak memanfaatkan celah atas tujuan para pemegang saham. Tingginya presentase dewan komisaris independen berarti

semakin banyak pula perusahaan memiliki dewan komisaris independen sehingga independensi akan makin tinggi karena tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham dan kebijakan terjadinya *tax avoidance* dapat ditekan rendah begitu pula sebaliknya (Eksandy, 2017) dalam (Prambudi & Setiawati, 2021).

Komite audit dalam sebuah perusahaan dipilih oleh komisaris independen untuk mengawasi pelaporan keuangan yang disajikan agar laporan keuangan tersaji secara benar dan tidak ada penyalahgunaan. Komite audit pada sebuah perusahaan dibentuk minimal dengan 3 anggota dengan itu maka komite audit berperan penting dalam *good corporate governance* agar tidak terjadi penghindaran pajak (Prambudi & Setiawati, 2021). Oktofian (2015) dalam (V. Rosalia, 2017) dalam penelitiannya memaparkan jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam *tax avoidance*.

Kualitas audit pada sebuah perusahaan merupakan hal penting untuk menjaga reputasi agar tetap baik. Sikap transparansi dibutuhkan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Adanya kualitas audit yang baik juga akan menjamin kualitas dalam hal perpajakan dalam perusahaan. KAP *big four* merupakan Kantor Akuntan Publik yang dipercaya misalnya (*Price Waterhouse Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst &*

Young) dipercaya lebih berkualitas dalam hal mengaudit laporan keuangan perusahaan (Prambudi & Setiawati, 2021).

Penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian (Prambudi & Setiawati, 2021) yang meneliti pengaruh tata kelola perusahaan yang baik pada penghindaran pajak pada tahun 2017 -2020 sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengupgrade sampai tahun terbaru dimulai pada tahun 2017-2021, sehingga dapat membandingkan bagaimana pengaruhnya terhadap *tax avoidance* hingga tahun 2021.

Budiman dan Setiyono (2012) mengategorikan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak apabila Cash Effective Tax Rate (CETR) kurang dari 25%, dan apabila Cash Effective Tax Rate (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan tabel 1.1 dibawah, dapat dilihat bahwa antara tahun 2017 sampai tahun 2021, beberapa perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini diduga melakukan *tax avoidance* . Pada kolom “CETR” yang menunjukkan terdapat beberapa perusahaan memiliki tingkat penghindaran pajak dibawah 25%. Tingkat *tax avoidance* dibawah 25% mengindikasikan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Proksi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris (Khan 2010) dalam (Prambudi & Setiawati, 2021). Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep- 305/BEJ/07-2004 setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman *good corporate governance*.

Berikut tabel mengenai *good corporate governance*, dan *tax avoidance* perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2017-2021 :

Tabel 1. 1 Data Good Corporate Governance dan Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021

No	Nama Perusahaan	Tahun	Corporate Governance				Tax Avoidance
			Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional	Komite Audit	Kualitas Auditor	CETR
1.	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2017	0.33	0.92	3	1	0,25
		2018	0.33	0.92	3	1	0,25
		2019	0.33	0.92	3	1	0,24
		2020	0.33	0.92	3	1	0,22
		2021	0.33	0.92	3	1	0,21
2	Delta Djakarta Tbk	2017	0.40	0.82	4	1	0,24
		2018	0.40	0.82	4	1	0,23
		2019	0.40	0.85	4	1	0,23
		2020	0.40	0.85	3	1	0,25
		2021	0.40	0.86	3	1	0,21
3	Indofood Sukses Makmur Tbk	2017	0.38	0.50	2	1	0,32
		2018	0.38	0.50	2	1	0,33
		2019	0.38	0.50	3	1	0,33
		2020	0.38	0.50	3	1	0,30
		2021	0.38	0.50	3	1	0,22
4	Mayora Indah Tbk	2017	0.40	0.59	3	0	0,25
		2018	0.40	0.59	3	0	0,33
		2019	0.40	0.59	3	0	0,36
		2020	0.40	0.59	3	0	0,22
		2021	0.40	0.59	3	0	0,22
5	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	0.50	0.81	4	1	0,32
		2018	0.50	0.81	4	1	0,28
		2019	0.50	0.81	4	1	0,28
		2020	0.50	0.81	4	1	0,26
		2021	0.50	0.81	4	1	0,20
6	Nippon Indosari Corpindo Tbk	2017	0.33	0.70	3	1	0,28
		2018	0.33	0.74	3	1	0,32
		2019	0.33	0.74	4	1	0,32
		2020	0.33	0.73	4	1	-0,05
		2021	0.33	0.87	4	1	0,25
7	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	2017	0.33	0.37	3	0	0,31
		2018	0.33	0.36	3	0	0,26
		2019	0.33	0.36	3	0	0,25
		2020	0.33	0.24	3	0	0,22
		2021	0.33	0.24	3	0	0,17
8	Sekar Laut Tbk	2017	0.33	0.93	3	0	1,03
		2018	0.33	0.93	3	0	0,41
		2019	0.33	0.93	3	0	0,45
		2020	0.33	0.93	3	0	0,24
		2021	0.33	0.76	3	0	1,17

Sumber : www.idx.com

(Winata, 2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

Dapat kita lihat dari tabel bahwa presentase komisaris independen antara tahun 2017-2021 beberapa perusahaan presentase komisaris independen nya lebih dari 30 % yang artinya bahwa memenuhi pedoman *good corporate govenance* yang mana harusnya *tax avoidance* semakin rendah namun merujuk pada tabel , CETR beberapa perusahaan mengalami penurunan antara tahun 2017-2021.

Tarjo (2008) dalam (Sintyawati, Ni Luh Ary, 2018) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Adanya kepemilikan saham oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi akan menyebabkan usaha pengawasan yang lebih efektif sehingga hal tersebut akan mampu mencegah perilaku oportunistik manajer (Kusumawati, 2011) dalam (Sintyawati, Ni Luh Ary, 2018). Kepemilikan saham perusahaan oleh investor institusional akan mendorong pengawasan yang lebih efektif karena

pihak institusi merupakan pihak yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional yang besar di dalam perusahaan akan berdampak pada semakin besarnya tingkat pengawasan yang dilakukan pihak pemegang saham institusional atas tindakan manajer yang kemudian mampu mengurangi biaya keagenan serta meningkatkan nilai perusahaan. Besarnya suatu kepemilikan institusional dapat menjadi suatu antisipasi terhadap suatu tindakan inefisiensi pemanfaatan aktiva yang dijalankan bersama dengan manajemen (Dewi 2019) dalam (Oktaviana & Kholis, 2021). Oleh sebab itu kepemilikan institusional dapat berperan dalam strategi manajemen, tetapi kebalikannya bahwa kepemilikan institusional juga dapat menjadi pengawas prosedur dalam suatu perusahaan agar terhindar dari praktek penghindaran pajak, dengan menerapkan *corporate governance* perusahaan yang baik (Moeljono, 2020) dalam (Oktaviana & Kholis, 2021).

Dapat dilihat pada tabel kepemilikan institusional perusahaan pada tahun 2017-2021 rata-rata presentase kepemilikan institusional lebih dari 50% yang dimana seharusnya tingkat pengawasan yang dilakukan pihak saham institusional semakin tinggi dan penghindaran pajak menurun namun dilihat pada tabel, CETR beberapa perusahaan mengalami penurunan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak meningkat..

Komite audit dalam sebuah perusahaan dipilih oleh komisaris independen untuk mengawasi pelaporan keuangan yang disajikan agar laporan keuangan tersaji secara benar dan tidak ada penyalahgunaan. Ukuran komite audit dijelaskan dalam keputusan Direksi BEJ nomor : KEP-399/BEJ/07-2001 Peraturan

Pencatatan Efek Nomor I-A Huruf C, yaitu keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota.

Semakin besar jumlah komite audit maka akan berpengaruh pada citra dan integritas serta kredibilitas perusahaan, karena semakin besar jumlah komite audit maka kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dan kebijakan lain yang menguntungkan manajer akan semakin kecil (Hakim, 2020) . Pada tabel seluruh perusahaan yang menjadi sample memiliki komite audit 3 anggota yang mana sudah sesuai batas minimal jumlah komite audit ,agar tidak terjadi *tax avoidance* ,namun bebarapa perusahaan mengalami penurunan pada CETR yang dimana menunjukkan tingkat penghindaran pajak meningkat.

Kualitas audit pada sebuah perusahaan merupakan hal penting untuk menjaga reputasi agar tetap baik. Sikap transparansi dibutuhkan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Adanya kualitas audit yang baik juga akan kualitas dalam hal perpajakan dalam perusahaan. *KAP big four* merupakan Kantor Akuntan Publik yang dipercaya misalnya (*Price Waterhouse Cooper, Deloitte ToucheTohmatsu, KPMG, Ernst & Young*) dipercaya lebih berkualitas dalam hal mengaudit laporan keuangan perusahaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang positif akan meminta auditor untuk menyingkirkan kecurangan dan tuntutan hukum. Oleh sebab itu kian tinggi kualitas audit suatu perusahaan lantas dapat dipercayai bahwa perusahaan tidak menjalankan praktik penghindaran pajak (Khairunisa & Hapsari 2017) dalam (Oktaviana & Kholis, 2021).

Dari data yang saya dapat yang tersaji pada tabel beberapa perusahaan bahkan hampir seluruh perusahaan yang menjadi sample menggunakan jasa

kantor akuntan *KAP big four* yang dipercaya dan berkualitas dalam hal mengaudit laporan keuangan namun beberapa perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan *KAP big four* mengalami penurunan pada CETR yang artinya tingkat penghindaran pajak meningkat .

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data panel dari laporan keuangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan antara *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* perusahaan. Penelitian yang dilakukan Fatimatus Zahra (2017) menjelaskan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak..Sedangkan menurut Humairah Mufidah (2019) kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Alasannya karena sektor makanan dan minuman menjadi salah satu motor utama yang memberikan kontribusi besar dalam realisasi investasi sehingga laporan keuangan sektor ini menjadi bahan perhatian bagi calon investor (bkpm.go.id). Dan karena sektor makanan dan minuman dianggap bisa lebih bertahan dalam krisis global karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan untuk sehari-hari atau bisa disebut dengan kebutuhan primer. Sejak krisis global yang terjadi

pada pertengahan 2008, hanya industri makanan dan minuman yang dapat bertahan. Permintaan pada sektor tersebut tetap tinggi (www.kompas.com).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat beberapa perusahaan dengan tingkat komisaris independen yang sudah memenuhi pedoman namun terjadi penurunan pada CETR sehingga diduga melakukan *tax avoidance*.
2. Terdapat beberapa perusahaan dengan tingkat presentase kepemilikan institusional lebih dari 50% namun terjadi penurunan pada CETR sehingga diduga melakukan *tax avoidance*.
3. Seluruh jumlah komite audit yang menjadi sample penelitian tidak kurang dari batas minimum komite audit yang telah ditetapkan sesuai standar namun terjadi penurunan pada CETR sehingga diduga melakukan *tax avoidance*.
4. Terdapat beberapa perusahaan dengan kualitas audit menggunakan jasa akuntan publik KAP bigfour yang merupakan kantor akuntan publik terpercaya namun tingkat CETR mengalami penurunan sehingga diduga melakukan *tax avoidance*.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini penulis memberikan batasan masalah *good corporate governance* yang menggunakan Komisaris independen, Kepemilikan Institusional, komite audit dan kualitas Audit yang menjadi variabel Independen (Bebas), dan *tax avoidance* yang diukur dengan rasio CETR sebagai variabel dependen (terikat), dan objek penelitian pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 8 perusahaan periode 5 tahun mulai dari tahun 2017 -2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman terdaftar dibursa efek indonesia?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman terdaftar dibursa efek indonesia?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman terdaftar dibursa efek indonesia?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman terdaftar dibursa efek indonesia?

5. Apakah komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman terdaftar dibursa efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan ditinjau dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melakukan analisis:

1. Pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan presentase dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman terdaftar dibursa efek Indonesia.
2. Pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman terdaftar dibursa efek Indonesia.
3. Pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman terdaftar dibursa efek Indonesia.
4. Pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan Kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman terdaftar dibursa efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Dan juga dapat menjadi tambahan referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya mengenai *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi terutama dalam Bidang akuntansi perpajakan. Khususnya pada faktor faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan dijadikan evaluasi terhadap perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya mengenai topik *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Tax avoidance*

Terdapat perbedaan pandangan mengenai pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Sehingga, walaupun dikatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia digunakan untuk kepentingan Negara dan masyarakat umum, masih banyak wajib pajak yang enggan membayarkan pajak mereka ataupun membayar pajak namun tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan karena mereka melakukan *tax avoidance*.

Menurut Prebble dan Prebble (2012:702) dalam (Y. Rosalia, 2017) penggelapan pajak dan penghindaran pajak melibatkan perilaku wajib pajak yang sama dan masing-masing dilakukan atas tujuan luas yang sama yaitu untuk meminimalkan atau menghilangkan kewajiban pajak, namun terdapat perbedaan secara hukum antara *tax avoidance* dan *tax evasion*, bahwa *tax evasion* adalah pelanggaran yang disengaja atau penggelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Rinaldi dan Cheisviyanny (2015:474) dalam (Y. Rosalia, 2017) menyimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah segala kegiatan yang menghambat dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Menurut Frank et al. (2009) dalam Oktaviani et al. (2015) :

“Perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk membayar sekecil mungkin pajak terutang, sedangkan di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk

membayai penyelenggaraan negara yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Bagi pihak manajemen perusahaan, beban pajak yang tinggi akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan, hal ini akan mendorong manajemen perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajaknya melalui berbagai cara baik secara legal maupun ilegal.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan *tax avoidance* sebagai tindakan atau perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak secara legal karena masih dalam kerangka peraturan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.1 1. Indikator *Tax Avoidance*

Terdapat beberapa indikator dalam mengukur penghindaran pajak. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat mengukur penghindaran pajak :

Tabel 2. 1 Indikator *Tax Avoidance*

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax income
2	CURRENT ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	CASH ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total - tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre- taxbppk income
4	LONG-RUN CASH ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwie totaal pre-tax accounting income}}$	Sun of cash taxes paid over n years dovided by the sam of pre-tax earning over n years
5	ETR DIFFERENTIAL	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the satutory ETR and Fir
6	DTAX	Error term form the following regression : ETR differential x Pre-tax book income = a+bx Control + e	The unexplained portion of the ETR differential
7	TOTAL BTD	Pre-tax book income – ((U.S CTE +Fgn CTE) / U.S STR – (NOLt -1))	The total difference between book and taxable income.
8	TEMPORA RY BTD	Deffered tax expense / U.S STR	The total difference between book and taxable income.
9	ABNORMAL TOTAL BTD	Residual from BTD /Tait = $\beta Tait + \beta mi$	A measure of unexplained total book-tax differences.
10	UNRECOGNIZED TAX BENEFITS	Disclosed amount post – FIN 48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions.
11	TAX SHELTER ACTIVITY	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosure,the oress,or IRS confidential data
12	TAX SHELTER ACTIVITY	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income.

Sumber : Supramono (2015)

Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan CETR (Cash Effective Tax Rate) sebagai proksi dari *tax avoidance*. Karena *tax avoidance* yang diproksikan dengan menggunakan CETR bertujuan untuk melihat seberapa besar kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar beban pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan karena CETR dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan CETR (Cash Effective Tax Rate) menurut Dyreng, et. al (2008) dalam (Simarmata & Cahyonowati, 2014), baik digunakan untuk “Menggambarkan kegiatan *tax avoidance* oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan CETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model CETR. “Semakin kecil nilai CETR, artinya semakin besar *tax avoidance* nya, begitupun sebaliknya.”

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) dalam (Yuliandana, 2021) perusahaan dikategorikan melakukan *tax avoidance* apabila Cash Effective Tax Rate (CETR) kurang dari 25%, dan apabila Cash Effective Tax Rate (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan *tax avoidance*.

Rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yaitu :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Contoh Soal:

Diketahui PT.Wilmar Cahaya Tbk memiliki beban pajak Rp.35.775 dan laba sebelum pajak Rp.143.195. Berapakah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan PT.Wilmar Cahaya Tbk?

$$\begin{aligned} \text{Jawab : CETR} &= \frac{35.775}{143.195} \\ &= 0,25 \end{aligned}$$

2.1.2 Good Corporate Governance**2.1.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance***

Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (2001:1) dalam publikasi pertamanya mendefinisikan *good corporate governance* berdasarkan Cadbury Committee, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Y. Rosalia, 2017).

Menurut Cadbury Committee (Akal & Akal, 2014) *Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008) dalam (Oktaviana & Kholis, 2021).

Corporate Governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Hendra: 2012) dalam (Eksandy, 2017).

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa, *good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas.

2.1.2.2 Tujuan Good Corporate Governance

Dalam keputusan BUMN Nomor Kep. :117/M-MBU/2002 dijelaskan bahwa penerapan *good corporate governance* bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai BUMN, meningkatkan nilai keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, dan bertanggungjawab serta adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, efisien, memberdayakan fungsi serta meningkatkan kemandirian.
3. Meningkatkan investasi nasional
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Mendorong agar organisasi dalam pembuatan dan pelaksanaan pelaksanaan keputusan dilandasi atas dasar nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. 117/MMBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Kewajaran (*Fairnes*) Adalah perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.
2. Transparansi (*Disclosure dan Transparency*) Adalah pemegang saham harus diberi informasi yang benar mengenai perusahaan, pemegang saham juga dapat mengambil keputusan mengenai perubahan atas perusahaan dan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
3. Akuntabilitas (*Accountability*) Bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham yaitu dengan pengawasan melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor.
4. Responsibilitas (*responsibility*) Para pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
5. Kesetaraan (*Fairness*) Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan

semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis kita.

Good Corporate Governance memiliki mekanisme yang terdiri dari mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal merupakan cara mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal meliputi rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Intependen, Kepemilikan Manajerial, pertemuan *Board of Director*, manajerial, kompensasi eksekutif serta komite audit sedangkan mekanisme eksternal meliputi pengendalian oleh pasar, *level debt financing* dan audit eksternal

2.1.2.4 Indikator Struktur *Good Corporate Governance*

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang *reliable*. Keberadaan dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al.,2001).

Variabilitas *good corporate governance* berhubungan dengan peranan dewan komisaris dalam masalah keagenan, yang berarti bahwa variabel dewan komisaris merupakan sebuah determinan penting dalam *good corporate governance* (Cheng, 2008). Keberadaan dan karakteristik dewan sebagai salah satu motor penggerak *good corporate governance* akan menentukan tingkat kesehatan kinerja keuangan perusahaan. Indonesia merupakan negara penganut

sistem *two tier*, dimana dewan terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi (Wardhani, 2007).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan komisaris adalah adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *good corporate governance* yang berfungsi dalam monitoring kinerja manajemen, menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) juga mendefinisikan Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Dewan komisaris sesuai dengan tugasnya yaitu melakukan fungsi pengawasan tidak boleh ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dewan komisaris dalam hal ini hanya mengambil keputusan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi (KNKG, 2006). Sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi. Dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk

pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS. Jika terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap (KNKG, 2006).

Board of directors atau dewan komisaris memiliki dua fungsi utama di dalam sebuah perusahaan. Fungsi servis berarti bahwa dewan komisaris dapat memberikan konsultasi dan nasihat kepada manajemen. Kedua, fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris (dalam teori agensi) mewakili struktur internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (FCGI, 2002). *Board of directors* atau dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* (FCGI, 2002). Oleh karena itu, peran dewan komisaris menjadi penting terkait dengan terwujudnya tata kelola perusahaan yang efektif.

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Beiner et al, 2003). Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang tepat agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *good corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Ruvinsky, 2005). Jumlah yang tepat berarti jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham. Jadi, ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham perusahaan

agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris ini didukung dengan keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisarisnya (FCGI, 2002).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) juga menjelaskan tentang jumlah anggota Dewan Komisaris yang harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Mengenai pemberhentian dewan komisaris juga dijelaskan yaitu pemberhentian dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota dewan komisaris tersebut diberi kesempatan untuk membela diri.

2. Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan keputusan Direksi BEI nomor: KEP-399/BEJ/07 Pencatatan Efek Nomor I-A menjelaskan bahwa Komisaris Independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen yaitu pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Jadi dapat disimpulkan bahwa komisaris independen ini memiliki peranan dalam membatasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan manajemen dan komisaris independen ini bertindak secara independen dan tidak melibatkan pihak lain dalam penugasannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Secara

langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

Komisaris independen dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan dan keinginan pemegang saham kepada para manajer. Munter dan Kren (1995) dalam (Hendratni, Nawasih, Indriati, & Universitas, 2018) menyatakan bahwa keanggotaan *eksternal board* dapat mendorong terciptanya sistem manajemen yang jelas dan membatasi perilaku oportunistik manajemen. Semakin meningkat komisaris independen, keputusan yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham semakin meningkat (Weisbach, 1998) dalam (Hendratni et al., 2018).

Komisaris independen diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen yang duduk pada jajaran dewan komisaris (Sanda et al., 2005). Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi. Komisaris independen dipandang sebagai posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan dengan fungsi *corporate governance* yang baik. Misi komisaris independen yaitu dijabarkan dalam tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan.

Proporsi dewan komisaris independen harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen (Antonia, 2008). Seperti pada ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT. Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI) nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C mengatur hal-hal mengenai Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan, yang menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Perusahaan Tercatat wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang- kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Emirzon, 2007).

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008) dalam (Lestari, 2017) .

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya pada suatu perusahaan. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi (Sekaredi, 2011) dalam (Hadiprajitno, 2014) .

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam perusahaan seperti mendisiplinkan, memantau, dan mempengaruhi. Berdasarkan hak dan

suara yang dimiliki oleh pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk meminimalisir perilaku mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional berperan untuk mendorong pengawasan optimal terhadap kinerja manajer dalam mengelola perusahaan sehingga berpotensi untuk mengurangi konflik kepentingan (Siregar & Syafruddin, 2020)

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

4. Komite Audit

Pengertian komite audit dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, tertanggal 24 September 2004 pada Peraturan nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit harus diketuai oleh seorang komisaris independen. Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *Good Corporate governance*. Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Komite audit beranggotakan komisaris independen (FCGI, 2001).

Kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisir. Menurut Forker (1992) dalam (Hadiprajitno, 2014) komite audit dapat mengurangi biaya keagenan dan

meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komite Audit juga memainkan peran penting dalam peningkatan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang menunjukkan bahwa komite audit harus bekerja secara independen dan melakukan tugasnya secara profesional.

Komite audit memonitor struktur yang meningkatkan kualitas arus informasi antara pemegang saham dan manajer (Rouf, 2011, hal.240), yang pada gilirannya, membantu meminimalkan masalah keagenan. Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari organisasi perusahaan (*Corporate Governance*). Bahkan untuk menilai pelaksanaan *good corporate governance* di perusahaan, adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam kriteria penilaian.

Komite audit memiliki tanggungjawab yang besar dalam menyiapkan audit, melakukan ratifikasi terhadap sistem pengendalian internal, dan memecahkan perselisihan dalam peraturan akuntansi. Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.

Ukuran komite audit dijelaskan dalam keputusan Direksi BEJ nomor : KEP-399/BEJ/07-2001 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Huruf C, yaitu keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang di antaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi atau keuangan (dalam Nurmala et. al, 2007).

Suhardjanto dan Apreria (2010) mengatakan syarat untuk menjadi anggota komite audit adalah independen atau tidak memiliki hubungan hubungan usaha maupun afiliasi dengan perusahaan, direktur, komisaris, maupun pemegang saham utama. Anggota komite audit juga harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

5. Kualitas Audit

Dalam penerapan CG, Kualitas Audit dengan pengungkapan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting. Menurut Sartori (2010) dalam (Akuntansi, Ekonomi, Andalas, & Sandy, 2008) , transparansi terhadap

pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham, alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Dies dan Giroux dalam Annisa (2011) menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain:

- a. Lamanya auditor/ umur audit, semakin lama maka semakin rendah kualitas auditnya.
- b. Jumlah klien, semakin banyak maka semakin baik kualitas auditnya.
- c. Kesehatan keuangan klien, semakin sehat maka ada kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku.
- d. Review oleh pihak ketiga, kualitas audit semakin tinggi apabila direview oleh pihak ketiga.

Berdasarkan penelitian Khoirunnisa, laporan keuangan yang diaudit oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* dengan beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*.

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan (Widiastuty, Erna dan Febrianto, 2010), jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four*, maka

akan lebih independen karena lebih dapat bertahan dari tekanan manajer untuk melaporkan adanya pelanggaran (Watts dalam Kurniasih: 2007).

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (2008: 54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. penelitian menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (2008: 54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.

2.2.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Boediono (2006) dalam Annisa dan Kurniasih(2012), variabel yang digunakan sebagai proksi *good corporate governance* secara partial (terpisah) untuk struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial untuk struktur dewan digunakan jumlah dewan komisaris. Banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara signifikan mempengaruhi penurunan aktivitas *tax avoidance*.

Temuan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) adalah semakin besar prosentase dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata. Hasilnya kenaikan presentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan tidak

signifikan mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Penelitian Antonia (2008) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen yang merupakan bagian dari komisaris perseroan tidak melakukan fungsi pengawasan secara baik terhadap manajemen. Hasil penelitian Widianingdyah dalam Antonia (2008) juga yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba, sehingga adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin besar. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan.

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khuranadan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan pajak

agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi short-term shareholder institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan long-term shareholder maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Selain itu hasil penelitian Irawan dan Aria (2012) menemukan bahwa kepemilikan saham institusi berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam penelitian Oktofian (2014) menyebutkan bahwa *tax avoidance* dapat mengurangi transparansi perusahaan dan menyebabkan *information asymmetry* dan menciptakan *moral hazard* sehingga penerapan *good corporate governance* diperlukan pada perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional maka terdapat kontrol manajemen yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan untuk mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial, hal ini dapat mengurangi konflik kepentingan antar manajemen dan *debt holders*. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadi penghindaran pajak.

2.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitian Winata (2014), Jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dimana semakin banyaknya jumlah komite audit yang ada pada sebuah perusahaan dapat membuat praktek *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang (Pohan,2008), jika jumlah komite audit kurang dari tiga orang maka tidak sesuai

dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan,2008). Komite audit yang berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan harus memiliki kompetensi yang cukup akan hal yang menjadi tanggung jawabnya (Mayangsari, 2003; dalam Annisa, 2012).

2.2.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Sandy dan Lukvierman (2014) dalam penelitiannya menyebutkan, apabila semakin banyak perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maka akan semakin rendah tax avoidance. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maka akan semakin tinggi tax avoidance. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu (Annisa & Kurniasih, 2012; Maharani & Suardana, 2014; Dewi & Jati, 2014) dimana penelitian terdahulu tersebut membuktikan secara empiris bahwa variabel Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

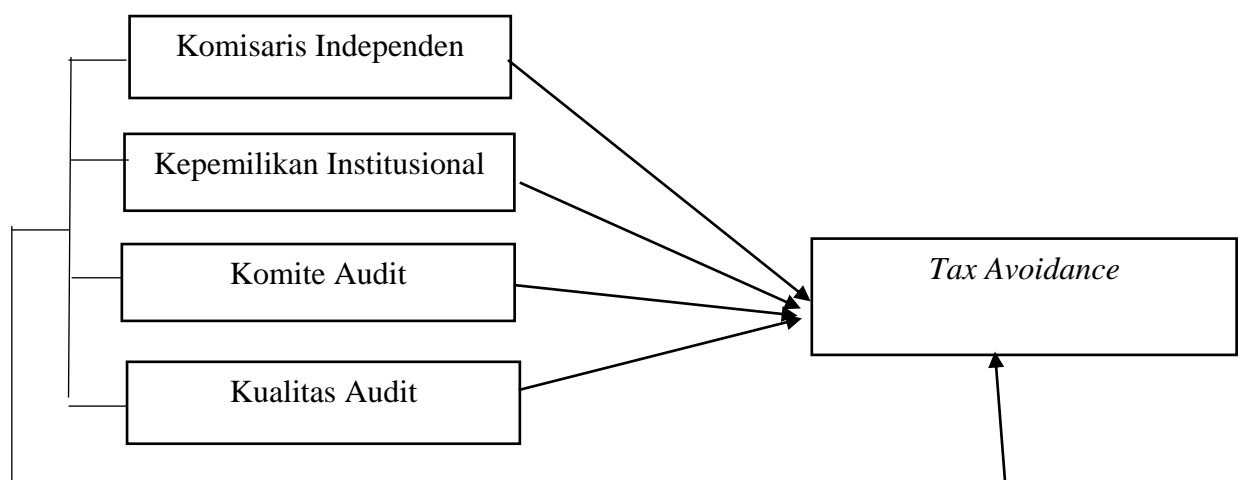
Hasil dari penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa adanya hubungan signifikan apabila suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Jika nominal pajak yang harus dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu, 2010). Penelitian Antonius dalam Luhglatno (2008) menjelaskan bahwa kredibilitas

pelaporan keuangan eksternal menjadi suatu permasalahan bagi para pemakai informasi keuangan yang disebabkan oleh audit failures. Contohnya pada kasus Enron tahun 2000 yang melaporkan pendapatannya lebih dari yang seharusnya dan dibenarkan oleh Arthur Andersen sebagai auditoreksternalnya. Adanya manipulasi pendapatan yang dilakukan nantinya juga dapat menguntungkan perusahaan dalam hal pajak yang harus dibayar oleh Enron, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa KAP yang bereputasi baik tidak melakukan suatu tindak kecurangan. Kasus ini menjadi perhatian karena akibatnya menjatuhkan reputasi Arthur Anderson (Luhglatno, 2008)

2.2.5 Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Selain meneliti komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* secara parsial, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* secara simultan.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara perilaku atau keadaan tertentu yang telah terjadi. “Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian”. (Juliandi. Irfan. & Manurung. 2015).

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian ini yaitu :

1. Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI periode 2017-2021.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI periode 2017-2021.
3. Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI periode 2017-2021.
4. Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI periode 2017-2021.
5. Komisaris independen, Kepemilikan Institusional, Komite audit dan Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan

Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI periode 2017-2021.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggambarkan jenis atau bentuk penelitian yang mendasari penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan asosiatif dan kuantitatif. pendekatan asosiatif adalah suatu pendekatan dimana untuk mengetahui bahwa adanya hubungan pengaruh diantara kedua variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Kemudian data yang dikumpulkan dalam bentuk kuantitatif.

Menurut (Sugiyono, 2017) pendekatan asosiatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih

Menurut (Sugiyono, 2017) metode kuantitatif juga dapat diartikan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif. digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. pengumpulan data melalui instrument penelitian. analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur atau mempermudah pemahaman dalam membahas suatu penelitian. Sesuai dengan judul penelitian maka terdapat tiga variabel penelitian. Berdasarkan

hipotesis yang akan di uji. maka variable yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel independent (bebas) dan variable dependent (terikat). Adapun variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Independen	Komisaris Independen	Organ perusahaan yang bertugas mengawasi secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat pada direksi	= Jumlah anggota <u>komisaris independen</u> Jumlah seluruh anggota dewan Komisaris	Rasio
	Kepemilikan Institusional	Besarnya kepemilikan saham perusahaan yang dipegang oleh institusi lain	= Proporsi saham <u>dimiliki institusi</u> Jumlah saham yang beredar	Rasio
	Komite Audit	Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit	= Σ Komite Audit	Nominal
	Kualitas Audit	Kualitas audit perusahaan untuk melihat apakah KAP terafiliasi dengan the big four atau tidak	KAP the big four: 1 KAP non big four: 0	Rasio
	Tax Avoidance	melihat ada tidaknya usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar UU yang ada	CETR = $\frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah sekumpulan yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membntuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Menurut populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam wilayah penelitian.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi perusahaan Manufaktur Sub sektor makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 yang berjumlah 20 perusahaan.

Tabel 3. 3 Daftar Populasi Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2017 -2021

NO	KODE	NAMA ENTITAS
1	ADES	PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk
2	AISA	PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
3	ALTO	PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk
4	BTEK	PT. BUMI TEKNOKNUL TURA UNGGUL Tbk
5	BUDI	PT. BUDI STARCH & SEETENER Tbk
6	CAMP	PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
7	CEKA	PT. WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk
8	CLEO	PT. SARIGUNA PRIMA TIRTA Tbk
9	DLTA	PT. DELTA DJAKARTA Tbk
10	FOOD	PT. SENTRA FOOD IND ONESIA Tbk
11	GOOD	PT. GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk
12	HOKI	PT. BUYUNG POETRA SEMBADA
13	ICBP	PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
14	INDF	PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
15	MGNA	PT. MAGNA FINANCE Tbk
16	MLBI	PT. MULTI BINTANG INDONESIA Tbk
17	MYOR	PT. MAYORA INDAH Tbk
18	PANI	PT.PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRY Tbk
19	PCAR	PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk
20	PSDN	PT. PRASHIDA ANEKA NIAGA Tbk

Sumber : www.idx.co.id

3.4.2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan

penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Sampel yang diambil dapat mewakili atau representatif bagi populasi tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

Kriteria yang penulis tetapkan dalam pengambilan sampel yaitu :

1. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021 dan dapat diakses melalui website www.idx.co.id.
2. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap tahun 2017-2021.
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2017 – 2021.
4. Laporan keuangan perusahaan terpublikasi secara umum bagi publik.
5. Laporan keuangan perusahaan disajikan dalam satuan rupiah.

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang didapat dalam penelitian ini menjadi 8 (delapan) perusahaan yang sesuai dengan kriteria.

Tabel 3. 4 Daftar Sampel Perusahaan Makanan dan Minuman Yang

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	CEKA	PT.Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
2	DLTA	Delta Djakarta Tbk
3	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
4	INDF	Indofood Sukses Tbk
5	MYOR	Mayora Indah Tbk
6	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
7	SKLT	Sekar Laut Tbk
8	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry Tbk

Terdaftar di BEI Periode 2017 -2021

Sumber : www.idx.co.id

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mendokumentasikan dari laporan keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

3.6 Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. menurut (Juliandi, 2015) analisis data kuantitatif adalah analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu". Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis data kuantitatif.:

3.6.1 Regresi Linier Berganda

Digunakan untuk meramalkan *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Dengan menggunakan persamaan regresi yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependent (corporate Governance)

α = Konstanta

β = Koefesien Regresi

X_1 = Variabel independent (*Komisaris Independen*)

X_2 = Variabel independent (*Kepemilikan Institusional*)

X_3 = Variabel independent (*Komite Audit*)

X_4 = Variabel independent (*Kualitas Audit*)

ε = Standart Error

Sebelum melakukan uji regresi berganda dilakukan uji persyaratan regresi yang disebut dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik regresi berganda bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model yang terbaik. jika model adalah model yang baik. maka hasil analisis regresi layak dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis. (Juliandi, 2015). Adapun syarat yang dilakukan untuk dalam pengujian regresi meliputi uji normalitas. uji multi kolinearitas. uji heterokedastisitas.

3.6.1.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi. variable dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. sehingga data dalam model regresi penelitian cenderung normal.

Kriteria untuk menentukan normal atau tidaknya data, maka dapat dilihat pada nilai probabilitasnya. Data adalah normal, jika nilai *kolmogorov smirnov* adalah tidak tidak signifikan (*Asymp. Sig (2-tailed)* > 0.05 ($\alpha = 5\%$)).

3.6.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel independen dengan ketentuan menurut (Juliandi, 2015) :

1. Jika nilai *tolerance* < 0.5 atau *value inflation factor* (VIF) > 5 maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius.
2. Jika nilai *tolerance* > 0.5 atau *value inflation factor* (VIF) < 5 maka tidak terdapat multikolinearitas yang serius.

3.6.1.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan lain. Metode informasi dalam pengujian heterokedastisitas yaitu metode scatterplot. Dasar pengambilan keputusan menurut (Juliandi, 2015) adalah :

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, sertatitik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Menurut (Juliandi, 2015) hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Jadi dapat

disimpulkan bahwa hipotesis diperoleh dengan memprediksi penelitian terdahulu sebagai referensi dalam pembuktian uji hipotesis berguna untuk mengetahui apakah secara parsial atau simultan memiliki hubungan antara X_1, X_2 berpengaruh terhadap Y ada dua jenis koefisien yang dapat dilakukan yaitu dengan uji t dan uji f .

3.6.2.1 Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t yaitu untuk menguji apakah variabel bebas.

Rumus yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :

$$t = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai t hitung

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Tahap-tahap:

1. Bentuk pengujian

H_0 : $r_s = 0$. artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

H_a : $r_s \neq 0$. artinya terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

2. Kriteria pengambilan keputusan

H_0 diterima : jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$. pada $\alpha = 5\%$. $ds = n - k$

H_0 ditolak : jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$

3.6.2.2 Uji F (Simultan)

Uji F ataupun uji signifikan serentak digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas untuk dapat menjelaskan keragaman variabel tidak terikat. serta untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol. Rumus uji F adalah sebagai berikut :

$$= \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

Fh= Nilai f hitung

R = Koefisien korelasi ganda

K= Jumlah variabel Independen

n = Jumlah anggota sampel

3.6.3 Koefisien Detirminasi

Nilai R-square dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R-square. semakin mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r² = Nilai Korelasi Berganda

100% = Persentase Kontribusi

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Subjek penelitiannya adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang datanya diambil langsung dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling dengan beberapa ketentuan.

Perusahaan yang diteliti adalah 8 perusahaan manufaktur khususnya untuk sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang menjadi sampel penelitian, dimana untuk jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 40 sampel.

Adapun pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 1 Daftar Nama Perusahaan Menjadi Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Tahun	Corporate Governance				Tax Avoidance
			Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional	Komite Audit	Kualitas Auditor	CETR
1.	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2017	0.33	0.92	3	1	0,25
		2018	0.33	0.92	3	1	0,25
		2019	0.33	0.92	3	1	0,24
		2020	0.33	0.92	3	1	0,22
		2021	0.33	0.92	3	1	0,21
2	Delta Djakarta Tbk	2017	0.40	0.82	4	1	0,24
		2018	0.40	0.82	4	1	0,23
		2019	0.40	0.85	4	1	0,23
		2020	0.40	0.85	3	1	0,25
		2021	0.40	0.86	3	1	0,21
3	Indofood Sukses Makmur Tbk	2017	0.38	0.50	2	1	0,32
		2018	0.38	0.50	2	1	0,33
		2019	0.38	0.50	3	1	0,33
		2020	0.38	0.50	3	1	0,30
		2021	0.38	0.50	3	1	0,22
4	Mayora Indah Tbk	2017	0.40	0.59	3	0	0,25
		2018	0.40	0.59	3	0	0,33
		2019	0.40	0.59	3	0	0,36
		2020	0.40	0.59	3	0	0,22
		2021	0.40	0.59	3	0	0,22
5	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	0.50	0.81	4	1	0,32
		2018	0.50	0.81	4	1	0,28
		2019	0.50	0.81	4	1	0,28
		2020	0.50	0.81	4	1	0,26
		2021	0.50	0.81	4	1	0,20
6	Nippon Indosari Corpindo Tbk	2017	0.33	0.70	3	1	0,28
		2018	0.33	0.74	3	1	0,32
		2019	0.33	0.74	4	1	0,32
		2020	0.33	0.73	4	1	-0,05
		2021	0.33	0.87	4	1	0,25
7	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	2017	0.33	0.37	3	0	0,31
		2018	0.33	0.36	3	0	0,26
		2019	0.33	0.36	3	0	0,25
		2020	0.33	0.24	3	0	0,22
		2021	0.33	0.24	3	0	0,17
8	Sekar Laut Tbk	2017	0.33	0.93	3	0	1,03
		2018	0.33	0.93	3	0	0,41
		2019	0.33	0.93	3	0	0,45
		2020	0.33	0.93	3	0	0,24
		2021	0.33	0.76	3	0	1,17

Untuk menganalisis data diatas penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif. Uji deskripsi data dilakukan terhadap data komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas auditor eksternal, komite audit dan *tax avoidance*. Analisis statistik digunakan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian, dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini disajikan hasil uji statistik deskriptif pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komis_Inde	40	.33	.50	.3750	.05661
Kepmilk_Insti	40	.24	.93	.7033	.20715
Komi_Audi	40	2.00	4.00	3.2250	.53048
Kual_Audi	40	0.00	1.00	1.6250	.49029
CETR	40	-.05	1.17	.3045	.20059
Valid N (listwise)	40				

Pada tabel 4.2 diatas menunjukkan jumlah sampel data perusahaan (N), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel independen, yang terdiri dari: komisaris independen (X_1), kepemilikan kepemilikan institusional (X_2), komite audit (X_3) kualitas auditor (X_4) dan *tax avoidance* (Y) merupakan variabel dependen dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variabel komisaris independen (X_1) diketahui bahwa nilai rata-rata komisaris independen adalah .3750 dengan standar deviasi .05661. Komisaris independen terendah adalah 0.33, terdapat

pada Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, Nippon Indosari Corpindo Tbk, Ultra Jaya Milk Industry Tbk dan Sekar Laut Tbk tahun 2017 sampai tahun 2021 dan tertinggi 0.5 terdapat pada Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2017-2021.

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variabel kepemilikan institusional (X_2) diketahui bahwa nilai rata-rata kepemilikan institusional adalah 0.7033 dengan standar deviasi 0.20715. Kepemilikan institusional terendah adalah 0.24 terdapat pada Ultra Jaya Milk Industry Tbk tahun 2020 dan tahun 2021 dan tertinggi 0.93 terdapat pada Sekar Laut Tbk tahun 2017 sampai tahun 2020

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variabel komite audit (X_3) diketahui bahwa nilai rata-rata komite audit adalah 3.2250 dengan standar deviasi 0.53048. Komite audit terendah adalah 2, terdapat pada Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2017 dan tahun 2018 dan tertinggi 4 terdapat pada Delta Djakarta Tbk tahun 2017 sampai tahun 2019, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2017 sampai tahun 2020, Nippon Indosari Corpindo Tbk tahun 2019 sampai tahun 2021

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variabel kualitas auditor (X_4) diketahui bahwa nilai rata-rata kualitas auditor eksternal adalah 1.6250 dengan standar deviasi 0.49029. Kualitas auditor terendah adalah 0, terdapat pada Mayora Indah Tbk, Ultra Jaya Milk Industry Tbk dan Sekar Laut Tbk untuk tahun 2017 sampai tahun 2021 dan tertinggi 1 terdapat pada Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, Delta Djakarta Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan Nippon Indosari Corpindo Tbk tahun 2017 sampai tahun 2021.

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variabel *tax avoidance* (Y) diketahui bahwa nilai rata-rata *tax avoidance* adalah 0.3045 dengan standar deviasi 0.20059. *Tax avoidance* terendah adalah -0,05, terdapat pada Nippon Indosari Corpindo Tbk tahun 2020 dan tertinggi 1,17 terdapat pada Sekar Laut Tbk tahun 2021.

4.1.2 Analisis Data

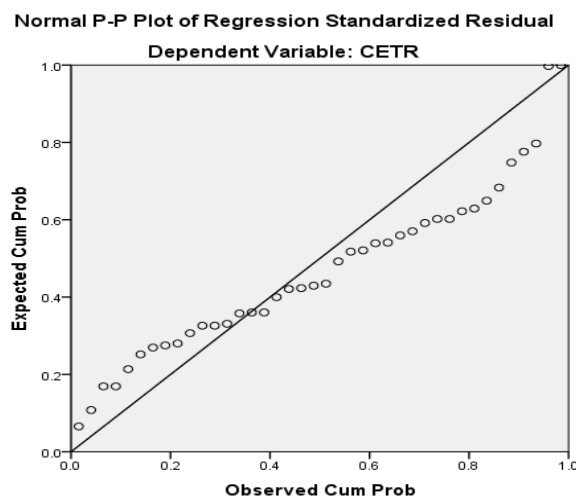
1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang dilakukan dalam analisis regresi linear terpenuhi. Uji asumsi klasik dalam penelitian penelitian ini menguji normalitas data secara statistik, uji multikolieneritas, uji heteroskedastisitas serta uji autokorelasi.

1) Uji Normalitas

a. Grafik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normal data ini menggunakan metode analisis grafik dan normal probability plot.



Gambar 4. 1 Penelitian menggunakan P-Plot

Berdasarkan gambar grafik 4.1 normal *probability plot* di atas dapat dilihat bahwa gambaran data menunjukkan pola yang baik dan data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka grafik normal *probability plot* tersebut terdistribusi secara normal.

b. Uji Kolmogorov Smirnov

Uji ini bertujuan agar dalam penelitian ini dapat mengetahui berdistribusi normal atau tidaknya antara variabel independen dengan variabel dependen atau keduanya, Dengan SPSS versi 23.00 maka dapat diperoleh hasil uji *Kolmogorov Smirnov* sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17370439
Most Extreme Differences	Absolute	.193
	Positive	.193
	Negative	-.115
Test Statistic		.193
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa K-S komisariss independen, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit dan *tax avoidance*, telah berdistribusi secara normal karena dari masing-masing variabel memiliki profitabilitas 0,193 lebih dari 0,05 dan nilai signifikan adalah $0,001 < 0,05$ yang berarti data berdistribusi secara Normal.

2) Uji Multikolineritas

Untuk menguji adanya multikolineritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai *tolerance* serta *Variance Inflation Factor* (VIF) seperti terlihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Multikolineritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.536	.225		2.385	.023		
Komis_Inde	.145	.604	.041	.240	.812	.737	1.356
Kepmilk_Insti	.386	.161	.399	2.394	.022	.771	1.297
Komi_Audi	-.082	.068	-.217	-1.214	.233	.669	1.494
Kual_Audi	-.180	.068	-.441	-2.644	.012	.770	1.298

a. Dependent Variable: CETR

(Sumber: Output SPSS, diolah Peneliti, 2022)

Pada Tabel 4.4 dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

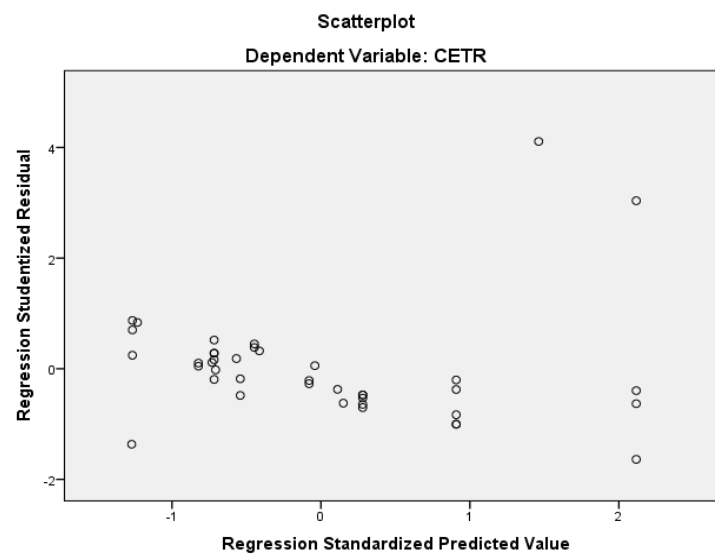
1. Komisariss independen (X_1) dengan nilai *tolerance* sebesar 0,737 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,356 lebih kecil dari 10.
2. Kepemilikan institusional (X_2) dengan nilai *tolerance* sebesar 0,771 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,297 lebih kecil dari 10.

3. Komite audit (X_3) dengan nilai *tolerance* sebesar 0,669 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,494 lebih kecil dari 10.
4. Kualitas auditor (X_4) dengan nilai *tolerance* sebesar 0,770 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,298 lebih kecil dari 10.

Karena nilai *tolerance* yang diperoleh untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang diperoleh untuk setiap variabel lebih kecil dari 10, maka artinya data variabel komisaris independen, kepemilikan menajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor eksternal dan komite audit bebas dari adanya gejala multikolinearitas

3) Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Penelitian menggunakan Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar diatas menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang akan digunakan.

2. Uji Regresi Berganda

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan tidak terjadi multikolinearitas, autokorelasi maupun heteroskedastisitas. Oleh karena itu data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengolahan data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu *statistic* yaitu program *software* komputer SPSS.

Tabel 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.536	.225		2.385	.023		
	Komis_Inde	.145	.604	.041	.240	.812	.737	1.356

Kepmilk_Insti	.386	.161	.399	2.394	.022	.771	1.297
Komi_Audi	-.082	.068	-.217	-1.214	.233	.669	1.494
Kual_Audi	-.180	.068	-.441	-2.644	.012	.770	1.298

a. Dependent Variable: CETR

(Sumber: Output SPSS, diolah Peneliti, 2022)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.536 + 0.145 X_1 + 0.386 X_2 - 0.082 X_3 - 0.180 X_4 + e$$

Dimana:

1. Nilai konstanta sebesar 0.536 apabila variabel komisararis independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas auditor dianggap nol, maka *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 0.536.
2. Nilai koefisien komisararis independen (X_1) sebesar 0.145 yang bertanda positif menyatakan bahwa komisararis independen mempunyai hubungan yang searah dengan *tax avoidance* . Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan komisararis independen 1% maka *tax avoidance* akan naik sebesar 0.145 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Nilai koefisien kepemilikan institusional (X_2) sebesar 0.386 yang bertanda positif menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai hubungan yang searah dengan *tax avoidance* . Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kepemilikan institusional 1% maka *tax avoidance* akan naik sebesar 0.386 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4. Nilai koefisien komite audit (X_3) sebesar -0.082 yang bertanda negatif menyatakan bahwa komite audit mempunyai hubungan yang berlawanan dengan *tax avoidance* . Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan komite audit 1% maka *tax avoidance* akan turun sebesar 0.082 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
5. Nilai koefisien kualitas auditor (X_4) sebesar 0.180 yang bertanda negatif menyatakan bahwa kualitas auditor mempunyai hubungan yang berlawanan dengan *tax avoidance* . Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kualitas auditor 1% maka *tax avoidance* akan turun sebesar 0.180 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

3. Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut setiap individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Hasil pengujian dengan uji t sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.536	.225		2.385	.023		
Komis_Inde	.145	.604	.041	.240	.812	.737	1.356
Kepmilk_Insti	.386	.161	.399	2.394	.022	.771	1.297
Komi_Audi	-.082	.068	-.217	-1.214	.233	.669	1.494
Kual_Audi	-.180	.068	-.441	-2.644	.012	.770	1.298

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas untuk komisaris independen terdapat nilai signifikan 0,812. Nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($\alpha=5\%$) atau nilai $0,812 > 0,05$. Variabel komisaris independen mempunyai t_{hitung} sebesar 0.240 dengan $t_{tabel} = 2.028$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas untuk kepemilikan institusional terdapat nilai signifikan 0,022. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($\alpha=5\%$) atau nilai $0,022 < 0,05$. Variabel komisaris independen mempunyai t_{hitung} sebesar 2.394 dengan $t_{tabel} = 2.028$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas untuk komite audit terdapat nilai signifikan 0,233. Nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($\alpha=5\%$) atau nilai $0,233 > 0,05$. Variabel komite audit mempunyai t_{hitung} sebesar -1.214 dengan $t_{tabel} = -2.028$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas untuk kualitas auditor terdapat nilai signifikan 0,012. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($\alpha=5\%$) atau nilai $0,012 < 0,05$. Variabel kualitas auditor mempunyai t_{hitung} sebesar -

2.644 dengan $t_{tabel} = -2.028$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

b. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.392	4	.098	2.918	.035 ^b
	Residual	1.177	35	.034		
	Total	1.569	39			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), Kual_Audi, Komis_Inde, Kepmilk_Insti, Komi_Audi

Pada tabel 4.6 uji-F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 2,918 dengan nilai signifikan 0,035 dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,64, maka diperoleh $F_{hitung} (2,918) < F_{tabel} (2,64)$ dengan nilai signifikan 0,035 dibawah nilai 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas auditor (*Corporate Governance*) memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah angka yang menunjukkan besarnya derajat atau kemampuan distribusi variabel independen (X) dalam menjelaskan dan menerangkan variabel dependen (Y). Semakin besar koefisien determinasi adalah nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Berikut ini nilai koefisien determinasi (R^2) penelitian ini:

Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.500 ^a	.250	.164	.18336	1.862

a. Predictors: (Constant), Kual_Audi, Komis_Inde, Kepmilk_Insti, Komi_Audi

b. Dependent Variable: CETR

(Sumber: Output SPSS, diolah Peneliti, 2022)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,250 atau 25% yang berarti bahwa hubungan antara *tax avoidance* dengan komisararis independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas auditor adalah masih rendah. Pada tabel juga ditunjukkan nilai *R Square* yaitu sebesar 0,250 atau 25% yang artinya variasi dari *tax avoidance* dengan komisararis independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas auditor sedangkan sisanya 75% variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini, misalnya pengelolaan aktiva dan hutang perusahaan dan variabel lainnya.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Dari hasil uji statistik komisaris independen terdapat nilai signifikan 0,812. Nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($\alpha=5\%$) atau nilai $0,812 > 0,05$. Variabel komisaris independen mempunyai t_{hitung} sebesar 0.240 dengan $t_{tabel} = 2.028$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini komisaris independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan tersebut maka dapat memperkecil kemungkinan adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan mengawasi dan mengontrol keputusan maupun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan tersebut.

Tidak semua anggota dewan komisaris dapat menunjukkan kualitasnya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Selain itu, jumlah dewan komisaris yang banyak dapat menyebabkan sulitnya koordinasi antar anggota dewan komisaris sehingga menghambat proses pengawasan. Semakin banyak jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan tersebut maka dapat memperkecil kemungkinan adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan mengawasi dan

mengontrol keputusan maupun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan tersebut.

Annisa dan Kurniasih (2012), variabel yang digunakan sebagai proksi *good corporate governance* secara partial (terpisah) untuk struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial untuk struktur dewan digunakan jumlah dewan komisaris. Banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara signifikan mempengaruhi penurunan aktivitas *tax avoidance*.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Dari hasil uji statistik kepemilikan institusional terdapat nilai signifikan 0,022. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($\alpha=5\%$) atau nilai $0,022 < 0,05$. Variabel komisaris independen mempunyai t_{hitung} sebesar 2.394 dengan $t_{tabel} = 2.028$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional

berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khuranadan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi short-term shareholder institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan long-term shareholder maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Selain itu hasil penelitian Irawan dan Aria (2012) menemukan bahwa kepemilikan saham institusi berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam penelitian Oktofian (2014) menyebutkan bahwa *tax avoidance* dapat mengurangi transparansi perusahaan dan menyebabkan *information asymmetry* dan menciptakan *moral hazard* sehingga penerapan *good corporate governance* diperlukan pada perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional maka terdapat kontrol manajemen yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan untuk mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial, hal ini dapat mengurangi konflik kepentingan antar manajemen dan *debt holders*. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadi *tax avoidance*

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Dari hasil uji statistik komite audit terdapat nilai signifikan 0,233. Nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($\alpha=5\%$) atau nilai $0,233 > 0,05$. Variabel komite audit mempunyai t_{hitung} sebesar -1.214 dengan $t_{tabel} = -2.028$. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya bahwa banyak atau sedikitnya jumlah komite audit yang berlatar belakang audit atau akuntansi tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya *tax avoidance*.

Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh cara pengukuran yang dilakukan dalam penelitian. Hasil tabulasi data untuk variabel komite audit cenderung tidak bervariasi sehingga data menjadi sulit untuk diukur secara tepat mengenai pengaruh variabel latar belakang akuntansi atau keuangan komite audit terhadap *tax avoidance*. Selain itu variabel komite audit diukur melalui gelar pendidikannya ini tidak dapat menjamin sepenuhnya, maksudnya seorang komite audit yang mempunyai gelar pendidikan akuntansi atau keuangan belum tentu dapat memberikan masukan untuk pengambilan keputusan *tax avoidance*. Misalnya seorang audit yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan namun mempunyai jam terbang atau dari pengalaman kerjanya ini dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dan menjalankan tugasnya dengan baik untuk memantau proses akuntansi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Kurniasih dan Sari (2012) yang menyatakan bahwa variabel komite audit yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan penelitian Winata (2014), Jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dimana semakin banyaknya jumlah komite audit yang ada pada sebuah perusahaan dapat membuat praktek *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang (Pohan,2008), jika jumlah komite audit kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan,2008). Komite audit yang berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan harus memiliki kompetensi yang cukup akan hal yang menjadi tanggung jawabnya (Mayangsari, 2003) dalam (Annisa, 2012).

4. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Dari hasil uji statistik kualitas auditor terdapat nilai signifikan 0,012. Nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($\alpha=5\%$) atau nilai $0,012 < 0,05$. Variabel kualitas auditor mempunyai t_{hitung} sebesar -2.644 dengan $t_{tabel} = -2.028$. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), bahwa audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (professional qualities) auditor independen dan pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Kualitas audit bisa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran KAP *The Big Four* yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Perusahaan yang diaudit KAP *The Big Four* akan kecil kemungkinannya melakukan *tax avoidance*, karena auditor *The Big Four* memiliki skill yang tinggi untuk mendeteksi area-area yang berpotensi untuk dimanfaatkan manajer melakukan *tax avoidance*. Semakin berkualitas auditor maka semakin tinggi kredibilitas angka akuntansi yang dilaporkan dengan demikian semakin besar tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian keberadaan KAP *The Big Four* pada perusahaan dapat mengurangi *tax avoidance* yang dilakukan manager.

Hasil dari penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa adanya hubungan negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, apabila suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Jika nominal pajak yang harus dibayar terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.

Fadhilah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four memang akan lebih cenderung dipercayai oleh fiskus karena memiliki reputasi yang baik serta memiliki integritas yang tinggi, namun jika perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik terhadap KAP yang mempunyai reputasi yang baik, bisa saja KAP tersebut melakukan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan KAP, seperti halnya kasus Enron. Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada jaminan dari hasil audit KAP The Big Four dapat meminimalkan tindakan *tax avoidance*.

5. Pengaruh *Corporate Governance* (Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Kualitas Audit) terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa *corporate governance* (komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit) berpengaruh *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan hasil $F_{hitung} (2,918) < F_{tabel} (2,64)$ dengan nilai signifikan 0,035 dibawah nilai 0,05. Dengan nilai *R Square* yaitu sebesar 0,250 atau 25% yang artinya variasi dari *tax avoidance* dengan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas auditor sedangkan sisanya 75% variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini, misalnya pengelolaan aktiva dan hutang perusahaan dan variabel lainnya.

Sejalan dengan dengan penelitian oleh (Eksandy, 2017) Berdasarkan hasil uji simultan dapat diketahui bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Yang artinya bahwa kepemilikan saham, dewan komisaris independen dan komite audit jika dalam pengelolaan perusahaan harus membuat aturan yang berlaku agar penghindaran pajak tidak dilakukan.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji bagaimana Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
2. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
3. Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
4. Kualitas auditor memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
5. *Corporate Governance* (komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit) secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan

6. dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 dengan nilai *R Square* yaitu sebesar 0,250 atau 25% yang artinya variasi dari *tax avoidance* dengan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas auditor sedangkan sisanya 75% variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini, misalnya pengelolaan aktiva dan hutang perusahaan dan variabel lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapat hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi perusahaan langkah pertama dan utama dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) adalah adanya dewan komisaris yang berperan aktif, independen, dan konstruktif. Untuk itu, dibutuhkan struktur, sistem, dan proses yang memadai agar hal tersebut dapat terwujud. Setidaknya mencakup komposisi, kemampuan dan pengalaman anggota dewan, serta bagaimana proses seleksi, peran, dan penilaian pengembangan usaha perusahaan.
2. Bagi manajemen perusahaan diharapkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya serta memilih sumber daya manusia yang berkompeten agar memberikan nilai tambah yang besar bagi perusahaan (human capital), melengkapi infrastruktur pendukung dalam operasional perusahaan yang dapat mendukung sumber daya manusia berfungsi dengan baik (structural capital).

3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* pada perusahaan lain seperti manufaktur lainnya, perbankan, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akal, M. N., & Akal, A. T. U. (2014). Corporate Governance, 1–162.
- Akuntansi, J., Ekonomi, F., Andalas, U., & Sandy, S. (2008). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur.
- Alpi, M. F. (2019). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 355–364.
- Amyulianthy, R. (2012). Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia. *Jurnal Liquidity*, 1(2).
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–9. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Arifani, R. (2013). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Arina Pratiwi, P. D., & Budiarta, I. K. (2018). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Gaya Kepemimpinan pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(3), 2226–2246. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i03.p22>
- Bagita, & Tambun, S. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 1(2), 2016.
- Bahtiar, E. T., Nugroho, N., Massijaya, M. Y., Roliandi, H., Rentry, A. N., & Satriawan, A. (2010). A new method to estimate modulus of elasticity and modulus of rupture of glulam I-joist. *AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.1063/1.3537940>
- Brigham, E. F., & Houston. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dahrani. (2021). Effect Of Return On Asset And Debt To Equity Ratio To Tax Avoidance In Company. *International Journal of Economics, Technology and Social Sciences*, 2(2), 454–461. Retrieved from <http://ypppal-amsi.or.id/penelitian/index.php/IFR/article/view/3>
- Drs. Dwi Prastowo D., M.M., A. (2015). Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi. In *Analisis Laporan Keuangan*
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa

- Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 1.
- FCGI. (2002). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, II(2002), 37.
- Geens, K. (2019). Helpt “good corporate governance”? In *Over grenzen en generaties heen*. <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qf1k1.8>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariant dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiprajitno, P. B. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 669–681.
- Hakim, F. (2020). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 01(8), 1689–1699.
- Hani, S. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pemilihan Akuntansi Konservatif. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, 12(1), 1–12.
- Hasan, K. M., & Halbouni, S. . (2013). Corporate governance, economic turbulence and financial performance of UAE listed firms. *Studies in Economics and Finance*, 30(2).
- Hendratni, T. W., Nawasiah, N., Indriati, T., & Universitas, B. (2018). Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2016, 3(1), 37–52.
- Hendrawati, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(2), 77.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komara, A., Hartoyo, S., & Andati, T. (2016). Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(1). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i1.141>
- Kresno, W., Dominikus, O., & Anis, C. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3).
- Laksana, J. (2015). Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2008-2012). *E-*

- Jurnal Akuntansi*, 11(1), 269–288.
- Lestari, L. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2(September), 293–306.
- Lesmana, S. (2018). *Metedologi Peneilitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: Madenetera.
- Machmud, N., & Djakman, C. D. (2010). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) Pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. *Simposium Nasional Akuntansi 11*, 1(1).
- Munawir. (2010). Analisa Laporan Keuangan Edisi 4. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Murhadi, W. R. (2015). Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham. In *Salemba Empat*.
- Oktaviana, D., & Kholis, N. (2021). Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya? *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 23(2), 217–228. Retrieved from <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Prambudi, I. A., & Setiawati, E. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*.
- Prastantio, M. (2015). Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 27(2), 56–75.
- Puniyasa, I. . M., & Triaryati, N. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Masuk Dalam Indeks CGPI. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(8).
- Ramdhaningsih, A., & Utama, I. M. K. (2013). Pengaruh Indikator Good Corporate Governance dan Profitabilitas pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E- Jurnal Universitas Udayana*, 3(3), 65–82.
- Retno, R. D., & Priantinah, D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010) Perusahaan yang. *Jurnal Nominal, (Online)*, 1(1).
- Ritonga, P. (2012). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 1–9.

- Rivai, V., & Permata, A. (2013). *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit: Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Serta Panduan Banker, Mahasiswa Dan Nasabah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Riyadi, S. (2011). *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: FE UI.
- Riyanto, B. (2013). *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Yogyakarta: YBPFE UGM.
- Rosalia, V. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2015). Retrieved from <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17331>
- Rosalia, Y. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), 890–909.
- Simarmata, A. P. P., & Cahyonowati, N. (2014). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 2(Nomor 2), Halaman 1-10.
- Sinambela, A., & Rachmawati, I. (2021). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia, 939–952.
- Sintyawati, Ni Luh Ary, M. R. D. S. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 993–1020.
- Subramanyam, W., & John, J. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d* (cetakan ke.). Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Veno, A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Go Public (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2011 Sampai 2013). *BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(1).
- Wardhani, R. (2007). Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 95–114.
- Widiastuty, Erna dan Febrianto, R. (2010). Pengukuran kualitas audit: sebuah esai erna widiastuty. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 1–43.
- Widyasari, N. A., Suhadak, & Husaini, A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility

- (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 26(1), 1–11.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.
- Windah, G. C., & Andono, F. A. (2013). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei The Indonesian Institute Perception Governance (Iicg) Periode 2008-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1), 1–20.
- Wulandari, R. (2013). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*, 2(1976), 1–52.
- Wulandari, S., Manajemen, M., Slamet, U., & Surakarta, R. (2015). Pengaruh Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pdam Kota Surakarta. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Desember*, 9(2), 196–204.
- Yuliandana, S. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 31–40.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

No	Nama Perusahaan	Tahun	Corporate Governance				Tax Avoidance
			Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional	Komite Audit	Kualitas Auditor	CETR
1.	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	2017	0.33	0.92	3	1	0,25
		2018	0.33	0.92	3	1	0,25
		2019	0.33	0.92	3	1	0,24
		2020	0.33	0.92	3	1	0,22
		2021	0.33	0.92	3	1	0,21
2	Delta Djakarta Tbk	2017	0.40	0.82	4	1	0,24
		2018	0.40	0.82	4	1	0,23
		2019	0.40	0.85	4	1	0,23
		2020	0.40	0.85	3	1	0,25
		2021	0.40	0.86	3	1	0,21
3	Indofood Sukses Makmur Tbk	2017	0.38	0.50	2	1	0,32
		2018	0.38	0.50	2	1	0,33
		2019	0.38	0.50	3	1	0,33
		2020	0.38	0.50	3	1	0,30
		2021	0.38	0.50	3	1	0,22
4	Mayora Indah Tbk	2017	0.40	0.59	3	0	0,25
		2018	0.40	0.59	3	0	0,33
		2019	0.40	0.59	3	0	0,36
		2020	0.40	0.59	3	0	0,22
		2021	0.40	0.59	3	0	0,22
5	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2017	0.50	0.81	4	1	0,32
		2018	0.50	0.81	4	1	0,28
		2019	0.50	0.81	4	1	0,28
		2020	0.50	0.81	4	1	0,26
		2021	0.50	0.81	4	1	0,20
6	Nippon Indosari Corpindo Tbk	2017	0.33	0.70	3	1	0,28
		2018	0.33	0.74	3	1	0,32
		2019	0.33	0.74	4	1	0,32
		2020	0.33	0.73	4	1	-0,05
		2021	0.33	0.87	4	1	0,25
7	Ultra Jaya Milk Industry Tbk	2017	0.33	0.37	3	0	0,31
		2018	0.33	0.36	3	0	0,26
		2019	0.33	0.36	3	0	0,25
		2020	0.33	0.24	3	0	0,22
		2021	0.33	0.24	3	0	0,17
8	Sekar Laut Tbk	2017	0.33	0.93	3	0	1,03
		2018	0.33	0.93	3	0	0,41
		2019	0.33	0.93	3	0	0,45

	2020	0.33	0.93	3	0	0,24
	2021	0.33	0.76	3	0	1,17

LAMPIRAN 2

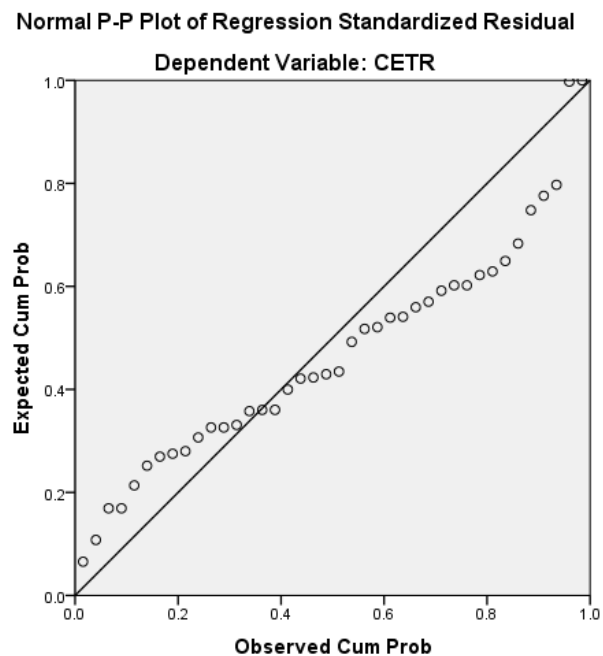
HASIL OLAHAN DATA SPSS

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komis_Inde	40	.33	.50	.3750	.05661
Kepmilk_Insti	40	.24	.93	.7033	.20715
Komi_Audi	40	2.00	4.00	3.2250	.53048
Kual_Audi	40	0.00	1.00	1.6250	.49029
CETR	40	-.05	1.17	.3045	.20059
Valid N (listwise)	40				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17370439
Most Extreme Differences	Absolute	.193
	Positive	.193
	Negative	-.115
Test Statistic		.193
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

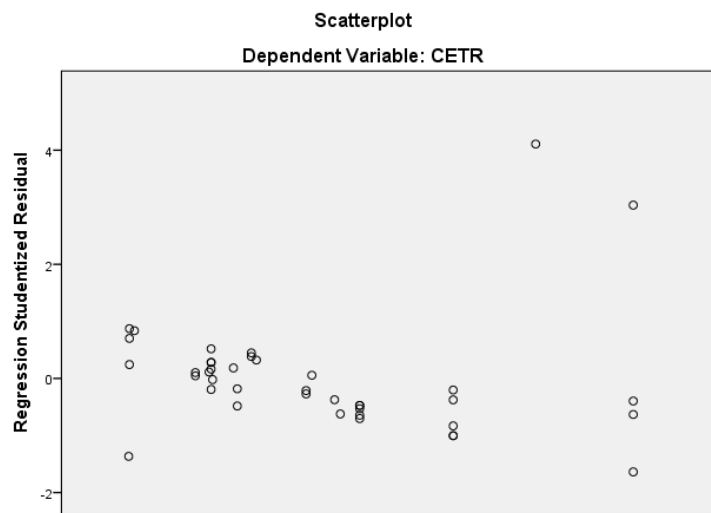
b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.536	.225		2.385	.023		
	Komis_Inde	.145	.604	.041	.240	.812	.737	1.356
	Kepmilk_Insti	.386	.161	.399	2.394	.022	.771	1.297
	Komi_Audi	-.082	.068	-.217	-1.214	.233	.669	1.494
	Kual_Audi	-.180	.068	-.441	-2.644	.012	.770	1.298

a. Dependent Variable: CETR

c. Uji Heteroskedastisitas



3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.536	.225		2.385	.023		
Komis_Inde	.145	.604	.041	.240	.812	.737	1.356
Kepmilk_Insti	.386	.161	.399	2.394	.022	.771	1.297
Komi_Audi	-.082	.068	-.217	-1.214	.233	.669	1.494
Kual_Audi	-.180	.068	-.441	-2.644	.012	.770	1.298

a. Dependent Variable: CETR

4. Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.536	.225		2.385	.023		
Komis_Inde	.145	.604	.041	.240	.812	.737	1.356
Kepmilk_Insti	.386	.161	.399	2.394	.022	.771	1.297
Komi_Audi	-.082	.068	-.217	-1.214	.233	.669	1.494
Kual_Audi	-.180	.068	-.441	-2.644	.012	.770	1.298

a. Dependent Variable: CETR

5. Uji Simultan (Uji-F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.392	4	.098	2.918	.035 ^b
	Residual	1.177	35	.034		
	Total	1.569	39			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), Kual_Audi, Komis_Inde, Kepmilk_Insti, Komi_Audi

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.500 ^a	.250	.164	.18336	1.862

- a. Predictors: (Constant), Kual_Audi, Komis_Inde, Kepmilk_Insti, Komi_Audi
- b. Dependent Variable: CETR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2622/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/22/2/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 22/2/2022

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : LATIFAH HANUM
NPM : 1805170107
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : - adanya penurunan harga saham perusahaan yang dampaknya pada nilai return perusahaan
- Perusahaan cenderung melakukan permasalahan terkait pembayaran pajak kepada negara
- terdapat berbagai kasus pajak yang dilakukan oleh perusahaan seperti penghindaran pajak serta penunggakan pajak

Rencana Judul : 1. Pengaruh perencanaan pajak dan corporate governance terhadap nilai perusahaan
2. pengaruh profitabilitas, likuiditas dan corporate governance terhadap penghindaran pajak
3. Pengaruh assets intensity dan debt policy terhadap penghindaran pajak

Objek/Lokasi Penelitian : BURSA EFEK INDONESIA

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Pemohon



(LATIFAH HANUM)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2622/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/22/2/2022

Nama Mahasiswa : LATIFAH HANUM
NPM : 1805170107
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 22/2/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Elizar Sinambela, SE., M.Si (05 Maret 2022)


Judul Disetujui**) : Pengaruh ^{Good} Corporate Governance terhadap
Tax Avoidance Acc 22/6-22.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan,

Dosen Pembimbing


(Elizar Sinambela SE., M.Si)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1911/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 06 Dzulhijjah 1443 H
05 Juli 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Bursa Efek Indonesia
Jln. Ir. H. Juanda No.A5-A6 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Latifah Hanum
Npm : 1805170107
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

gila menghiasi surat ini agar diebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1914/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 22 Juni 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Latifah Hanum
N P M : 1805170107
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 05 Juli 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : **06 Dzulhijjah 1443 H**
05 Juli 2022 M



Tembusan :

1. Pertinggal



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502





PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : L A T I F A H H A N U M

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 1 0 7

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 2 8 0 4 2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : T E M B U N G

Tempat Penelitian : B U R S A E F E K I N D O N E S I A

Alamat Penelitian : J L . I T . H . J U A N D A B A R U
N D . A B . P S . M E R A H B A R A T
K E C . M E D A N K O T A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

Wassalam
Pemohon



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : LATIFAH HANUM
N.P.M : 1805170107
Dosen Pembimbing: ELIZAR SINAMBELA S.E., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- Pasangkan judul dan isi sesuai - Perbaiki latar belakang masalah - Perbaiki batasan masalah	16/4-22	El.
BAB 2	- Perbaiki tujuan penelitian - Teori & sesuaikan - kerangka konsep & perbaiki - hipotesis & sesuaikan.	6/6-22	El.
BAB 3	- Definisikan variabel - Teknik penentuan sampel - tempat & waktu penelitian	29/6-22	El.
Daftar Pustaka	- direrikan - judul direrikan.	1/7-22	El.
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Data direrikan dgn sempit variabel.	4/7-22	El.
Persetujuan Seminar Proposal	- Selesai Bimbingan, Acc & Diminta	El. 2/7-22	El.

Medan, Juni 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 15 Juli 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Latifah Hanum*
NPM. : 1805170107
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 28 April 2000
Alamat Rumah : Jalan Masjid Gang Teratai 23 Pasar X Tembung
Judul Proposal : Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang dan identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Tambah teori</i>
Bab III	<i>Perbaiki defint. operasional</i>
Lainnya	<i>Perbaiki judul dan tambah daftar pustaka</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 15 Juli 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanun, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE., M.Si

Pemanding

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 15 Juli 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Latifah Hanum
NPM : 1805170107
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 28 April 2000
Alamat Rumah : Jalan Masjid Gang Teratai 23 Pasar X Tembung
Judul Proposal : Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Elizar Sinambela, SE, M.Si*

Medan, 15 Juli 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE., M.Si

Pembanding

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 2460/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 20 Muharram 1444 H
22 Agustus 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Bursa Efek Indonesia
Jln. Juanda No. A5-A6 Medan Sumatera Utara
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Latifah Hanum
N P M : 1805170107
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax avoidance pada Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502





Indonesia Stock Exchange
member of **wfe** WORLD FEDERATION
OF EXCHANGES



FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-042045/BEI.PSR/9-2022
Tanggal : 5 September 2022

Kepada Yth. : H. Januri, SE., MM., M.Si
Dekan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alamat : Jalan Kapten Mucthar Basri No. 3
Medan

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Latifah Hanum
NIM : 1505170107
Jurusan : Akuntansi

Telah menggunakan data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan skripsi dengan judul "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia"

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

M. Pintor Nasution
Kepala Kantor



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
menjawab surat ini, agar disebutkan
per dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

☎ <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 📠 perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1275 / KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Latifah Hanum
NPM : 1805170107
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 Muharram 1444 H.
09 Agustus 2022 M.



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Latifah Hanum
NPM : 1805170107
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 28 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Email : hanumlatifa2804@gmail.com
Nomor HP : 0813-7511-6513
Alamat : Jalan Masjid Gang Teratai 23 Pasar X
Tembung Desa Bandar Khalipah
Kabupaten Deli Serdang.
Anak Ke- : 2 dari 3 Bersaudara

2. DATA ORANG TUA

Ayah : ABDUL HUSIN
Ibu : MAZIDAH
Alamat : Jalan Masjid Gang Teratai 23 Pasar X
Tembung Desa Bandar Khalipah
Kabupaten Deli Serdang.

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 101767 Deli Serdang Tahun 2012
Sekolah Menengah Pertama : SMP Swasta PGRI Deli Serdang Tahun
201
Sekolah Menengah Atas : SMA Swasta Budisatrya Medan Tahun
2018
Perguruan Tinggi : S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara Tahun 2022

Medan, 9 September 2022



LATIFAH HANUM